

DAFTAR REFERENSI

- Angelia, A., & Widuri, R. (2014). Analisa Putusan Banding Berkaitan Dengan Ekualisasi Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–16.
- Anshari, T. (2017). *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Helmy, A. M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Penghematan Pajak Pada Perusahaan Tiga Jaya Jakarta Berdasarkan Hasil Sidang Pajak Tahun 2014-2016. *Calyptra*, 8(1), 135–154.
- Hery. (2019). *Akuntansi Dasar 1&2*. Jakarta: PT Grasindo
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan Per Januari 2015*. Jakarta: Graha Akuntan.
- Libriyanti, S. (2014). Tax Review Atas Analisis Equalisasi Pada Spt Masa PPN Dan Spt Tahunan PPh Badan Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Arus Kas Pt" X"(Aesthetic Clinic) (*Doctoral dissertation, Universitas Airlangga*).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Marentek, E., & Budiarmo, N. (2016). Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Transworld Solution Jakarta Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 868–879. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11815>
- Modugu, K. P., & Anyaduba, J. O. (2014). Impact of tax audit on tax compliance in Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*, 5(9), 207–215.
- Nugraha, I. (2014). Analisis Ekualisasi SPT PPN Masa Dengan SPT PPh Badan Pada PT. Australian Belt Scraper Indonesia. *Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu*. 39–48.
- Parulian, E. S., & Tjen, C. (2020). Evaluasi Tax Diagnostic dan Tax Audit Review Pada PT. X Dalam Rangka Pelaksanaan Tax Efficiency dan Self-Defence atas Pemeriksaan Pajak. *Liquidity*, 9(2), 133–146.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta
- Pratama, I. F., & Sutomo, H. (2018). Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN Dengan SPT PPh Badan Terhadap Kewajiban Perpajakan PT. Adiyana Teknik Mandiri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(3), 117–122. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v6i3.292>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

- Suandy, E (2016). *Perencanaan Pajak Edisi Enam*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sukmawati, A., & Winata, A. (2019). Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A Di Kota Solo. *Jurnal Vokasindo*, 7(2), 88-99.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks
- Tangkuman, S., Sondakh, J., & Muaja, R. J. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 82–91.
- TMBooks. (2019). *Pajak Penghasilan-Peraturan, Penghitungan, dan Pelaporan*. Yogyakarta: Andi
- Pajak Penghasilan. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf>
Diakses: 15 September 2021
- Pajak Pertambahan Nilai. Diambil dari https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20ppn%20ver%2025102013%20upload_0.pdf Diakses: 15 September 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diambil dari <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009> Diakses: 20 Agustus 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Diambil dari <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-42-tahun-2009> Diakses: 30 September 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Diambil dari <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>
Diakses: 30 September 2021
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Diambil dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor04pj2012>
Diakses: 10 Agustus 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Diambil dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/38~PMK.011~2013> Diakses: 30 September 2021

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Diambil dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2015/184~PMK.03~2015Per.pdf> Diakses: 30 September 2021

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/211 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain. Diambil dari <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-21pj2014> Diakses: 30 September 2021

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Diambil dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/94TAHUN2010PP.htm> Diakses: 30 September 2021

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2011 tentang Penegasan Saat Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Sebagai Dasar Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Saat Pembuatan Faktur Pajak. Diambil dari <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-50pj2011> Diakses: 30 September 2021

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Seri PPh Umum Nomor 35) Diambil dari <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-29pj-41996> Diakses: 30 September 2021

DDTC News (2021): Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak Tahun 2018-2019. Diambil dari <https://www.news.ddtc.co.id/optimalisasi-ict-dalam-mendongkrak-penerimaan-pajak-26094> Diakses: 20 Agustus 2021

Laporan APBN 2016-2020: Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2016-2020. Diambil dari <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara> Diakses: 10 Agustus 2021.